

**ANALISIS KRITIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
PASAL 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Oleh :

**Mohammad Roni Mustofa**

**Abstract**

This thesis is studies of Straightening of law to Section 273 Law Number, 2009 About Traffic And Road Transportation. By the legal and social legal reseach method, obtained conclusion that : 1. Straightening of law to Section 273 Law Number, 2009, still be not able yet to be executed effectively, because : a. Arrangement un-clarify of meaning "road organizer" is institutionally or officials having authority in arrangement, construction, development, observation, keeping, and road research. b. Finds equipment of evidence that road organizer" not immediately and properly improve; repairs damage road, or doesn't give sign or fringe at damage road and has not been improve;repaired. c. Determines because strongest generates victim effect lightly injured and/or vehicle damage and/or goods, results hardly injured, and results others to pass away. 2. Effort which can be done by investigator Polri in applying Section 273 Law Number, 2009 is by increasing increases knowledge of law science, investigation skill, integrity, and morality as investigator Indonesia Police. Hereinafter is recommended to mean road organizer according to inviters Law Number 22, 2009 About Traffic and Road Transportation, and inviters Law Number 38, 2004 About Road following its execution regulation need to be clarified, that is enough limited to officials having authority does arrangement, construction, development, observation, keeping, and research of road good to national road, province, region road, city road, turnpike, and also special road.

**Key words : Law Enforcement, Traffic and Road Transportation**

**Abstrak**

Tesis ini membahas masalah Penegakan Hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian lokumlokumlive dan Sosiologis, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Penegakan lokum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, masih belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena : a. Ketidakjelasan pengaturan makna "penyelenggara jalan" apakah secara kelembagaan ataukah Pejabat yang berkewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan, dan penilikan jalan). b. Menemukan alat bukti bahwa "penyelenggara jalan" tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak, atau tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki. c. Menentukan sebab yang paling kuat (langsung) menimbulkan akibat korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, mengakibatkan luka berat, dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Polri dalam menerapkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah dengan meningkatkan pengetahuan ilmu lokum, keterampilan penyidikan, integritas, dan moralitas sebagai penyidik Polri. Selanjutnya direkomendasikan agar makna penyelenggara jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan berikut Peraturan Pelaksanaannya perlu diperjelas, yaitu cukup sebatas Pejabat Yang Berkewenangan melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan, dan penilikan jalan baik untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan tol, maupun jalan khusus.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

## **Pendahuluan**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia. Sebab, jalan merupakan prasarana kehidupan mobilitas masyarakat yang vital bagi pencapaian tujuan yang diinginkan, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan pertahanan. Kongkretnya, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Mencermati substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat nilai-nilai fundamental yang mendasarinya, antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Maka pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
- b. Secara konsepsional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- c. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.
- d. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- e. Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Kemudian mengenai upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas. Selain itu, untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan

melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pengaturan dan penerapan sanksi pidana telah diatur lebih tegas di banding undang-undang sebelumnya. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia. Sebab, jalan merupakan prasarana kehidupan mobilitas masyarakat yang vital bagi pencapaian tujuan yang diinginkan, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan pertahanan. Kongkretnya, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Mencermati substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat nilai-nilai fundamental yang mendasarinya, antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Maka pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi

terkait (stakeholders) untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.

- b. Secara konsepsional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- c. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.
- d. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- e. Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Kemudian mengenai upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas. Selain itu, untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang

tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pengaturan dan penerapan sanksi pidana telah diatur lebih tegas di banding undang-undang sebelumnya. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia. Sebab, jalan merupakan prasarana kehidupan mobilitas masyarakat yang vital bagi pencapaian tujuan yang diinginkan, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan pertahanan. Kongkretnya, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Mencermati substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat nilai-nilai fundamental yang mendasarinya, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Maka pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
2. Secara konsepsional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
3. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai

wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

4. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
5. Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Kemudian mengenai upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas. Selain itu, untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pengaturan dan penerapan sanksi pidana telah diatur lebih tegas di banding undang-undang sebelumnya. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

## **Permasalahan**

1. Mengapa penegakan hukum Pasal 273 UU No 22 Tahun 2009 belum dapat dilaksanakan secara efektif ?
2. Apa upaya penyidik Polri dalam menerapkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?

## **Pembahasan**

### **A. Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 273 UU No 22 Tahun**

Seperti telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, masalah pokok yang terkandung dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, adalah mengenai siapakah yang dimaksud dengan “penyelenggara jalan”. Undang-Undang ini sama sekali tidak memberikan penjelasan baik dalam ketentuan umum maupun penjelasannya.

Demikian pula menurut Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang menentukan kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap jalan, dilaksanakan oleh:

- 1) Pemerintah untuk penyelenggaraan jalan nasional;
- 2) Pemerintah Provinsi untuk penyelenggaraan jalan Provinsi;
- 3) Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- 4) Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jalan Kota.

Tetapi menurut Pasal 1 butir 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan : “Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya”. Berarti penyelenggara jalan adalah : Pemerintah untuk penyelenggaraan jalan nasional; Pemerintah Provinsi untuk penyelenggaraan jalan Provinsi; Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jalan Kabupaten dan Jalan Desa; Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jalan Kota.

Pengertian subyek hukum, tidak hanya terbatas pada “manusia” sebagai *Natuurlijke Persoon* (natural person) yaitu manusia pribadi, tetapi juga kumpulan manusia sebagai *Rechtspersoon* (legal entitle) yaitu badan hukum keperdataan, yang dibentuk berdasarkan hukum perdata seperti : Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, dan Yayasan, maupun Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum Publik, seperti : Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan, Kantor Wilayah, Dinas-Dinas,

dan jajarannya di tingkat Pusat maupun Daerah yang menjalankan urusan Pemerintahan dan Pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, pertanggung jawaban hukum tindakan subyek hukum baik orang maupun badan hukum juga tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum keperdataan tetapi juga ketentuan hukum publik : Pidana, Tata Negara dan Administrasi Negara.

Dalam perkembangannya istilah Badan Hukum Perdata dan Badan Hukum Publik kemudian diberi label dengan sebutan “korporasi”. Dari sudut pandang hukum perdata, korporasi menurut Subekti dan Tjitrosudibio, adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Demikian pula menurut Rudi Prasetyo : “kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah : (a). memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut; (b). memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut; (c) memiliki tujuan tertentu; (d ) berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Menurut ELSAM, adanya korporasi yang melakukan kejahatan sekarang ini bukanlah hal yang langka, media massa seringkali memberitakan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi baik di luar maupun di dalam negeri. Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi ini ternyata tidak hanya terjadi pada masa-masa sekarang saja, tetapi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana Korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum Korporasi yang melakukan tindak pidana, seperti teori *identification doctrine*, *aggregation doctrine* yang lahir jauh pada awal abad ke-20. Selain itu, di Indonesia sendiri, berbagai undang-undang yang mengatur korporasi juga telah lama ada, seperti Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perpajakan, dll.

Namun, keberadaan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu memberikan kepuasan bagi pencari keadilan. Korporasi sebagai *non state actor* pun



telah menikmati impunity, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan, dan tidak ada usaha untuk memprosesnya secara hukum dengan maksimal. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan di bidang lingkungan hidup. Merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup yang diduga kuat ditimbulkan oleh berbagai kinerja Korporasi, pihak kepolisian tidak segera melakukan tindakan pengusutan. Biasanya yang akan berteriak keras atas pencemaran tersebut adalah korban atau organisasi masyarakat yang memberi perhatian khusus terhadap lingkungan hidup.

Dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka pihak korban atau masyarakat kemudian melakukan upaya hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Korporasi dengan mengajukan gugatan class action atau legal standing, namun upaya hukum tersebut hanya terbatas pada gugatan secara perdata. Padahal, jika tuntutan pidana dilakukan maka akan mempunyai kelebihan dibanding penyelesaian dalam proses perdata, yakni: Pertama pertanggungjawaban pidana mempunyai prosedur perlindungan yang lebih kuat. Kedua, hukum pidana ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang lebih memiliki kekuatan dan resources dibandingkan dengan penggugat (perdata). Ketiga, hukuman pidana memberikan stigma dan pencelaan kepada pelaku. Keempat, hukum pidana memiliki peran untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang kesalahan pelaku.

Tidak bekerjanya hukum dengan efektif untuk menjerat kejahatan Korporasi, selain karena keberadaan suatu Korporasi dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas perekonomian nasional, sering kali juga disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administratif daripada suatu kejahatan yang serius.

Tetapi, adanya upaya yang dilakukan oleh tim pembaharuan KUHP yang mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang (naturalijk person), tetapi juga badan hukum (recht person), maka terbuka kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang merupakan kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh Korporasi, memastikan atas perbuatan pidana siapa sajakah suatu Korporasi harus bertanggung jawab secara pidana, serta memilih jenis jenis pemidanaan yang paling tepat bagi Korporasi agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan deterrent effect.

Penerapan pertanggungjawaban pidana Korporasi pada awalnya menghadapi sejumlah masalah hukum, khususnya menyangkut asas tiada pidana tanpa kesalahan (genstrap zonder schuld). Seperti diketahui, tindak pidana tidak berdiri sendiri. Tindak pidana

tersebut baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dipidana.

Untuk dapat dipidanya seseorang, ia harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewiltbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan adalah merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Dalam pengertiannya, tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagaimana ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang kemudian juga dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pembuat tindak pidana mempunyai kesalahan.

Yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Apabila pembuat tindak pidana memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi pidana. Tetapi, apabila pembuat tindak pidana tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian, asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana. Karena kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf, maka kesalahan ini hanya dapat diterapkan pada manusia karena untuk memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, biasanya dilihat dari usia. Apabila seseorang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau sudah menikah, maka ia sudah dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab karena sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk,

yang harus dikerjakan dan yang harus dihindari. Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab ini tidak kepada setiap orang tetapi hanya kepada orang yang sudah dianggap dewasa, kecuali dalam kondisi tertentu. Begitu juga dengan unsur kesengajaan, unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku memang memiliki keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan memaksudkan dengan tindak pidana tersebut tercapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, unsur kesalahan hanya dapat dipenuhi oleh orang (naturlijke person). Bagi Korporasi, unsur kesalahan ini sulit apabila diterapkani, karena Korporasi bukanlah manusia. Ia tidak memiliki jiwa dan karena itu sulit untuk mengetahui niat serta mengukur kedewasaannya. Namun, apabila Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena sulitnya membuktikan kesalahan, maka akan terjadi impunity terhadap Korporasi, padahal Korporasi juga banyak melakukan tindak pidana.

Jadi, konteks kejahatan terhadap kepentingan publik tidak mengandung motif berikut unsur-unsur politik-ideologi, namun tindak pidana yang dimaksudkan memang untuk melakukan pemupukan keuntungan (finansial) oleh pribadi maupun golongannya, dimana dampak dari tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian bagi kepentingan masyarakat luas. Konteks situasi Indonesia saat ini setidaknya mengandung dua kelemahan, yakni : kelemahan pada sistem hukum dan kontrol publik. Kelemahan dalam kejahatan tersebut, baik dari segi substansinya maupun kelemahan aparturnya. Kelemahan dari dimensi kontrol publik, adalah tidak berjalannya proses pengawasan oleh lembaga-lembaga yang kompeten maupun tersumbatnya akses masyarakat luas atas informasi dan mekanisme akuntabilitas publiknya. Dengan karakteristik kejahatan yang demikian, sejak awal penegakan hukum pada kejahatan terhadap kepentingan publik sangat rentan dengan intervensi secara politik maupun ekonomi.

Dalam perkembangannya, kajian-kajian kriminologi dan ilmu sosial lainnya telah merespon modus-modus kejahatan terhadap kepentingan publik yang dilakukan oleh korporasi ataupun pejabat pemerintahan yang memiliki otoritas politik maupun sumber daya ekonomi. Pada tahun 2001, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mengeluarkan Ketetapan tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001). Ketetapan tersebut memberikan rekomendasi agar pemerintah membentuk undang-undang yang muatannya meliputi : pembentukan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, perlindungan saksi dan korban, kejahatan terorganisasi, kebebasan mendapatkan informasi, etika pemerintahan, kejahatan pencucian uang, dan komisi ombudsman. Sebelumnya pada tahun 1999 sebagai respon dari pergantian rezim Presiden Soeharto, dibentuklah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sejauh ini, pembentuk undang-undang telah merespon melalui beberapa undang-undang yang memiliki pertautan langsung dengan jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik, seperti : kejahatan terhadap konsumen (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999), kejahatan lingkungan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997), kejahatan farmasi dan kesehatan (narkotika dan psikotropika – Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-undang Kesehatan - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992), kejahatan ekonomi (monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), berbagai undang-undang yang berkait dengan profesi (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran), serta tindak pidana perpajakan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Perpajakan, berbagai undang-undang di bidang perpajakan, dan Pembentukan Pengadilan Pajak melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002), Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups), dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Terkait dengan peraturan perundang-undangan di atas, maka menurut pendapat penulis ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dapat dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Kepentingan Publik.

Karena itu, wajib ditegakkan secara konsekuen dan konsisten oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini tentu jasa Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya penyidik Polri di bidang penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.

## **B. Upaya penyidik Polri dalam menerapkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hakikatnya merupakan bagian integral dari Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari aspek “budaya hukum” (legal culture), sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum”.

Maraknya berbagai kasus mafia peradilan merupakan indikator menurunnya/tergesernya kualitas pendekatan religius dan pendekatan keilmuan. Bukan “ilmu hukum/ilmu ketuhanan” yang digunakan, tetapi “ilmu/pendekatan lain” (ilmu amplop; pendekatan kekuasaan/politik/massa; dsb). Kalau tokh ilmu hukum digunakan, terkesan menggunakan “ilmu hukum ekstrak dan parsial” atau “ilmu hukum kaca mata kuda”, yaitu :

- a. Memisahkan antara “norma undang-undang dengan asas-asas, tujuan pemidanaan, dan nilai/ide dasar yang ada dan diakui dalam ilmu/teori/hukum tidak tertulis”;
  - b. memisahkan “kepastian hukum/melawan hukum formal dengan kepastian hukum/melawan hukum materiel”;
  - c. memisahkan “hukum (UU)” dan “ilmu hukum”;
  - d. banyak yang tahu “hukum/UU”, tetapi tidak tahu atau melupakan “ilmunya” (ilmu hukum).
  - e. memisahkan “ilmu hukum” dengan “ilmu ketuhanan (moral/agama)”;
  - f. memisahkan “ketiga masalah pokok Hukum Pidana (tindak pidana; kesalahan; pidana) dengan keseluruhan sistem pemidanaan”;
  - g. memisahkan “penegakan hukum (UU) pidana dengan rambu-rambu (sistem) penegakan hukum nasional”;
- atau memisahkan antara Sistem Hukum Pidana dengan Sistem Hukum Nasional”.

Berkembangnya “budaya amplop, budaya jalan pintas, budaya kaca-mata kuda, dan budaya coffee-extract” tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai “budaya keilmuan” dan “budaya religius”. Dari sudut pandang agama, budaya suap jelas sangat tercela.

Apalagi adanya “budaya mafia peradilan” (yang merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum tanpa “ilmu hukum” dan “ilmu ketuhanan”) jelas dapat merusak “sustainable development/sustainable society” karena sumber daya (“resources”) pembangunan tidak hanya sumber daya alam/fisik, tetapi juga sumber daya non-fisik. Tegasnya, mafia peradilan pada hakikatnya merupakan bentuk eksploitasi yang merusak sumber daya non-fisik dan dapat menjadi “virus” bagi Sistem peradilan Pidana yang sehat/ideal; ini berarti dapat merusak kualitas kehidupan masyarakat.

Karena itu, menurut Barda Nawawi Arief, untuk mewujudkan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang baik/sehat, yang dapat menjamin keadilan (“ensuring justice”), keamanan warga masyarakat (“the safety of citizens”), yang jujur, bertanggung jawab, etis, dan efisien (“a fair, responsible, ethical and efficient criminal justice system”), dan dapat menumbuhkan

kepercayaan serta respek masyarakat (“public trust and respect”), maka salah satu upaya yang mendasar ialah meningkatkan kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya Argumentasinya :

- a. Kualitas keilmuan, tidak hanya dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (“in abstracto” maupun “in concreto”). Produk apapun akan dikatakan berkualitas (mempunyai nilai lebih/nilai tambah) apabila diproses dengan ilmu yang berkualitas. Produk yang diproses dengan ilmu yang berkualitas, akan mempunyai nilai lebih/nilai tambah dan penghargaan yang lebih tinggi. Demikian pula “produk hukum” (baik produk legislatif, maupun produk judikatif/judicial, berupa BAP, dakwaan/tuntutan Jaksa, dan putusan hakim) akan lebih berkualitas dengan menggunakan ilmu;
- b. Hukum dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya (penerapan/penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu “ilmu hukum”; bukan dengan “ilmu amplop” atau ilmu dan sarana-sarana lainnya.
- c. Sesuai dengan “Ilmu Ketuhanan”, yang intinya menyatakan: “kualitas/kesuksesan/kebahagiaan hidup (dunia/akhirat)”, termasuk kualitas penegakan hukum di dunia, hanya dapat dicapai dengan ilmu “ilmu itu cahaya, kebodohan itu kegelapan”; Ilmu, imtaq, dan amal merupakan “perniagaan yang tidak akan merugi” Artinya, ilmu dan keimanan merupakan kunci keberhasilan; “Tunggulah saatnya kehancuran, apabila sesuatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya (artinya : tidak dengan ilmu). .

Atas dasar pemikiran di atas, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkualitas dan bebas mafia peradilan maka kebijakan pengembangan sistem peradilan harus merupakan :

- a. bagian integral dari kebijakan membangun kepercayaan dan respek masyarakat;
- b. bagian integral dari kebijakan pengembangan sistem pemerintahan yang baik; dan
- c. bagian integral dari kebijakan meningkatkan kualitas lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;

Bahwa dalam arti yang luas, Sistem Peradilan Pidana adalah identik dengan ”Sistem Kekuasaan Kehakiman” yang hakikatnya merupakan ”Sistem Penegakan Hukum”. Bekerjanya sistem peradilan atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (”criminal justice system”), merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu cukup panjang, ialah melalui tahapan : penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan (mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung), serta eksekusi pidana.

Pada setiap tahapan itulah terbuka peluang terjadinya ”permainan kotor/tercela” yang sekarang disebut dengan ”mafia peradilan”. Untuk menanggulangi ”permainan kotor/tercela” (mafia peradilan), diperlukan kebijakan pengembangan (pembaharuan) kualitas peradilan dengan meningkatkan :

- a. kualitas individual (SDM) peradilan: Polisi, Jaksa, Penasihat, Hakim, dan Panitera.
- b. kualitas institusional/kelembagaan;
- c. kualitas mekanisme tata kerja/manajemen, kualitas sarana/prasarana;

- d. kualitas substansi hukum/perundang-undangan;
- e. kualitas lingkungan (kondisi sosial, ekonomi politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat;
- f. kualitas sistem pengawasan dan kontrol, di samping peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas aparaturnya penegak hukum. Ini penting, sebab "mafia peradilan" berkaitan erat dengan masalah "abuse of power".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945, "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung". Maka, seyogianya Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi mengawasi penegakan hukum oleh badan-badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, tetapi juga mengawasi seluruh tahapan penegakan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai putusan dijatuhkan dan eksekusi. Dengan kata lain Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengendali dan pengawas dari keseluruhan proses penegakan hukum.

Perlu ditegaskan, secara teoretik maupun faktual konsep Kamtibmas dan penegakan hukum tidak lepas kaitannya dengan persoalan akar kejahatan yang merupakan eskalasi dari adanya persoalan sosial. Bahwa "potensi gangguan" yang tidak ditanggulangi dengan baik akan berubah menjadi "ambang gangguan" untuk kemudian menjadi "ancaman faktual" terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu tuntutan masyarakat terhadap Polri adalah terbentuknya sumber daya manusia Polri yang profesional untuk dapat melaksanakan komitmennya sebagai Pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum, Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat. Dalam konteks ini, Institusi Polri sudah menetapkan berbagai kebijakan sejak diundangkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagaimana terwujud dalam Grand Strategi Polri 2005-2025 berikut implementasi di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Personil Polri.

Karena itu, pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar sebagaimana terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya Polri dan dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut. Dan bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesuai Peraturan Kapolri Nomor: 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Ditreskrimsus adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok Polda yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi.

Kegiatan penyidikan pada garis besarnya dilakukan meliputi tahapan: Penindakan, Pemeriksaan, Pemberkasan, dan penyelesaian Berkas Perkara. Pada level penindakan kegiatannya terdiri atas: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pada level ini, memang akan bersentuhan langsung dengan kegiatan pengekangan hak asasi seseorang apakah ia sebagai Saksi maupun Tersangka. Karenanya, terhadap pelaksanaan tugas Penangkapan maupun Penahanan dan memasuki rumah dalam rangka menangkap, menggeledah serta menyita (pasal 1 butir 17 KUHAP), wajib dilakukan dengan cermat berdasarkan atas hukum, agar terhindar dari gugatan Pra Peradilan oleh pihak keluarga ataupun pihak Kuasa Hukum Tersangka. Sedangkan pada level pemeriksaan tiap-tiap tindakan dan tingkah laku Penyidik hendaknya mendudukkan para Saksi dan Tersangka sebagai subyek hukum yang mempunyai kedudukan yang sama (Presumption of innocence) sehingga akan didapat suatu keterangan yang murni, tidak ada unsur paksaan dan intervensi kepada pihak-pihak yang dihadapi, kemudian dituangkan kedalam Berkas Perkara bersifat "Pro Justitia". Demikian pula penyajian alat pembuktian pada persidangan di pengadilan haruslah melalui penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dengan mempedomani sistem pembuktian menurut KUHAP.

Apa yang dilakukan oleh Penyidik pada level pemeriksaan, memang terbuka kemungkinan atau celah-celah bagi timbulnya persoalan HAM seperti menghilangkan waktu dan pengekangan sementara waktu terhadap Saksi dan/atau Tersangka. Sehingga pada level ini, Penyidik sangat perlu bertindak secermat-cermatnya, bersikap dan bertindak profesional sesuai peraturan hukum yang berlaku. Kegiatan pada saat pemberkasan dan penyelesaian Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir yang merupakan perumusan analisa yuridis dan fakta kejadian serta menyimpulkan persangkaan atas perkara tindak pidana yang ditangani. Disertai pula penyeleksian semua kelengkapan administrasi penyidikan, kemudian dibundel untuk diserahkan (dikirimkan) berkas perkaranya baik tahap pertama maupun kedua, berikut Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa selaku Penuntut Umum untuk diteruskan ke Pengadilan.

## **Penutup**

Penegakan hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, masih belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena :



- a. Ketidakjelasan pengaturan makna “penyelenggara jalan” apakah secara kelembagaan ataukah Pejabat yang berkewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan, dan penilikan jalan).
- b. Menemukan alat bukti bahwa “penyelenggara jalan” tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak, atau tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki.
- c. Menentukan sebab yang paling kuat (langsung) menimbulkan akibat korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, mengakibatkan luka berat, dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Polri dalam menerapkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah dengan meningkatkan pengetahuan ilmu hukum, keterampilan penyidikan, integritas, dan moralitas sebagai penyidik Polri.

#### **Daftar Pustaka**

- A.Hamid S. Attamimi, 1992. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bambang Poernomo, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1994. Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : PT Citra Aditya Bahkti.
- \_\_\_\_\_, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2008. Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Semarang : Pustaka Magister.
- \_\_\_\_\_, 2008. RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang : Penerbit Pustaka Magister Semarang.

- \_\_\_\_\_, 2009. Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Franz Magnis Suseno, 1999. Etika Politik, Cetakan kelima, Jakarta : PT. Gramedia.
- Friedmann, 1993. Teori dan Filasafat Hukum; Susunan I, Legal Theory, terjemahan: Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Gidden, Antony. 1999. The Third Way, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- H.S. Djayoesman, 1976. Polisi dan Lalu-Lintas. Bandung : Mabes Kepolisian Republik Indonesia Press.
- Lamintang, P.A.F. 1984. Hukum Panitensier Indonesia, Bandung : Armico.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, 2000. Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung : Alumni.
- Moeljatno, 1983. Azas-azas Hukum Pidana, Cet. I, Jakarta : Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : PT Alumni.
- Nonet, Phillippe & Philip Selznick, 2001. Law and Society in Transition: toward Responsive Law , New Jersey : Transaction Publishers.
- Parson, Talcot, 1986. Essei-Essei Sosiologi Talcot Parson, Talcot Parson Essays Sociology, Jakarta : Aksara Persada Press.
- R. Susilo, 1979. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor : Politeia.
- Roelof H. Heveman, 2002. The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia, Jakarta : Tata Nusa.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sahetapy, 1994. Kejahatan Korporasi, Bandung : Eresco.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 2000. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V.
- \_\_\_\_\_, 2006. Membedah Hukum Progresif, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

\_\_\_\_\_, 2007. Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.